

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok; Rajagrafindo Persada.
- Darwis Anatami. 2021. *Pengenalan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan*. Yogyakarta; Deepublish Publisher (CV Budi Utama).
- Edward Manik. 2013. *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta; CV Mandar Maju.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta; Mirra Buana Media.
- J.Satrio. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung; PT Citra Aditya Bakti.
- Joko Sriwidodo dan Tumanggor. 2024. *Kajian Perkembangan Hukum kepailitan dan PKPU Di Indonesia*. Yogyakarta; Kepel Press.
- Jonaedi Effendi dan Jhonny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok; Prenada Media.
- Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Edisi Kedua. Jakarta; Kencana.
- Kartono. 2014. *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Jakarta; Pranadya Paramita.
- Lenny Nadriana. 2019. *Ahli Waris Pemegang Personal Garansi Dapat Pailit*. Cetakan Pertama. Jakarta Selatan; Lembaga Studi Hukum Indonesia.
- M.Hadi Shubhan. 2009. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta; Kencana.
- Man S. Sastrawidjaja. 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung; Alumni.
- Munir Fuadi. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta; Raja Grafindo.
- _____. 1999. *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*. Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Nasokha dan Ganis Vitayanty. 2023. *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitor Wanprestasi*. Pejaten Timur; Damera Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta; Kencana.
- _____. 2019. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Cetakan Ketujuh. Jakarta; Kencana Prenadamedia Group.
- R.Subekti. 1992. *Aneka Perjanjian*. Bandung; PT Citra Aditya Bakti.
- _____. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta; Intermasa.
- Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta; Sinar Grafika.

- Rahayu Hartini. 2020. *Hukum Kepailitan*. Malang; Universitas Muhammadiyah Malang.
- Salim HS. 2005. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2022. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Sri Budi Purwaningsih. 2021. *Hukum Jaminan dan Agunan Kredit Dalam Praktek Perbankan di Indonesia*. Sidoarjo; Umsida Press.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2016. *Hukum Benda*. Yogyakarta; Liberty.
- Suparji. 2018. *Kepailitan*. Jakarta; UAI Press.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2009. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta; Pustaka Utama Grafiti.
- _____. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Edisi 2, Cetakan 1. Jakarta; Kencana.
- Syamsudin M.Sinaga. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta; Tatanusa.
- Umar Haris Sanjaya. 2014. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*. Yogyakarta; NFP Publishing.

SKRIPSI DAN TESIS

- Jeppy Nanta, 2008, *Pembatalan Perdamaian Dalam Kerangka PKPU Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Retno Gunarti, 2008, *Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Bank Pada Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Wahyu Adi Wibowo, 2022, *Kedudukan hukum perjanjian Penanggungan (Borgtocht) Sebagai Bentuk Pengikatan Kredit Di BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
- Wirawan Bayu Aji, 2010, *Restrukturisasi Utang Perusahaan Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

JURNAL

- Abdul Aziz, Wira Franciska, dan Felicitas Sri Marniati, 2023, *Kepastian Hukum Jaminan Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Pakai Di Atas Hak Milik Perorangan Terkait Penolakan Pembiayaan Oleh Perbankan*, Jurnal Riset Ilmiah Volume 2 Nomor 12, Universitas Jayabaya, Jakarta.

- Adriel Michael Tirayo dan Yoefanca Halim, 2019, Problematik Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Volume 6 Nomor 2, Universitas Tarumanegara, Jakarta.
- Ahmad Ahsan, Joko Sriwidodo dan Mardi Candra, 2024, *Kapasitas Penjamin Perorangan Dalam Sengketa Kepailitan*, Jurnal Riset Ilmiah Volume 3 Nomor 1, Universitas Jayabaya, Jakarta.
- Ahmad Diha'ul Khoiri, 2019, "*Analisis Putusan Homologasi Atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg)*", Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Ashibly, 2018, *Hukum Jaminan*, MIH Unihaz, Bengkulu.
- Atika Ismaol, 2021, *Analisis Alternatif Restruturisasi Utang atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan dan Likuidasi*, Jurnal Kepastian Hukum & Keadilan Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Palembang.
- Azkia An Nida Fasya dan Andriyanto Adhi Nugroho, 2022, *Sikap Pengurus terhadap Perbedaan Nilai Tagihan Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal USM Law Review Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Benedictus Hananta Manogihon dan Ditha Wiradiputra, 2023, *Problematika pengajuan PKPU oleh Kreditor Berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*, Jurnal Unes law Review Volume 6 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Danang Wirahutama, *et.al*, 2018, *Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik*, Masalah-masalah Hukum Jilid 47 Nomor 2, Universitas Sebelas Maret.
- Djoni Sumardi Gozali dan Noor Hafidah, 2022, *Dasar-dasar Hukum Kebendaan*, UII Press, Yogyakarta.
- Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong Papua Barat, 2016, *Hakekat Insan Monodualistik Perspektif Pendidikan*, Al-Riwayah : Jurnal Kependidikan, Volume 8 Nomor 1, Fakultas Pendidikan Agama Islam, Sorong.
- Ervin Ramadhan Imannulloh dan Najamuddin Khairur Rijal, 2022, *Upaya Indonesia dalam Mendorong Prioritisasi Perekonomian Negara Berkembang melalui G20: Perspektif Hyper-Globalist*, Jurnal Indonesian Perspective, Volume 7 Nomor, Universitas Diponegoro.
- Fadhillah Iffah dan Yuni Fitri Yasni, 2022, *Manusia Sebagai Makhluk Sosial*, Jurnal Lathaif, Volume 1 Nomor 1, Department of Al-Quran and Tafsir Science UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
- Florianus Yudhi Priyo Amboro, 2020, *Restrukturisasi Utang Terhadap Perusahaan Go Public Dalam Kepailitan dan PKPU*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Volume 49 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

- Hari Sutra Disemadi dan Danial Gomes, 2021, *Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Volume 9 Nomor 3, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha.
- Ivan harsono dan Paramita Prananingtyas, 2019, *Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Maneer*, Jurnal Notarius Volume 12 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Katrin Martha Ulina dan Hendron Bag Saptono, 2002, *Akibat Hukum Putusan Penolakan PKPU Terhadap Debitor*, Jurnal Diponegoro Law Review Volume 1 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- N.Sambe, 2016 *Fungsi Jaminan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Pihak Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, Jurnal Unsrat Volume V Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Nurul Badriyah, 2009, *Peran Intermediasi Perbankan Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, Jurnal UMM, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang,
- Madeline Mamesah, et.al, 2022, *Sistem Transaksi Elektronik Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Online*, Lex Privatum Volume X Nomor 1, Universitas Sam Ratulangi.
- Patricia Caroline Tiodor, et.al, 2023, *Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan*, Jurnal Krisna Law Volume 5 Nomor 1, Universitas Krishnadwipayana.
- Pina Nurhandayani, et.al., 2025, *Akuntabilitas Hukum Corporate Guarantee Dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi: Kajian Terhadap Debitur Wanprestasi*, Jurnal Ensiklopedia Volume 7 Nomor 2, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Rahma Yulia, 2024, *Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jurnal Dedikasi Hukum Volume 3 Nomor 3, Universitas Andalas, Padang.
- Riza Fibriani, 2022, *Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ius Constituendum Volume 7 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang.
- Rosalia Hidayat, 2021, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Penanggung/Borgtoch Dalam Perkara Kepailitan dan PKPU Terhadap Utang Debitor*, Jurnal Hukum Volume 7 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- Sahat Tambunan, M.Sudirman, dan MArni Emmy Mustafa, 2025, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitor dan Penjamin Perorangan yang Dinyatakan Pailit*, Jurnal Bisnis Mahasiswa Volume 5 Nomor 1, Universitas Jayabaya, Jakarta.
- Septiana Dwiputri Maharani, 2016, *Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan di Indonesia*, Jurnal Filsafat, Volume 26 Nomor 1, Universitas Gadjah Mada.

- Stephanie Nathania Maramin, *et.al*, 2023, *Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli Online Pada Aplikasi Facebook*, Lex Privatum nomor 4 Volume XI, Universitas Sam Ratulangi.
- Sukendar dan Aris Prio Agus Santoso, 2021, *Pengantar Hukum Jaminan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Hukum kepailitan, Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan*, Edisi Kedua, Jakarta, Prenada Media.
- Tommy dan Yolanda, 2023, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Iblam Law Review Volume 3 Nomor 3, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
- Ulifia Hasanah, 2012, *Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dhubungkan Dengan PP. No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1, Universitas Riau, Riau.
- Yasmin Ghaisani Sya'Bina dan Togi Marolop Pangaribua, 2024, *Pertanggungjawaban Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Kepailitan : Studi Kasus Putusan Nomor 6/PDT.SUS-PAILIT/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.*, Jurnal Lex Parimonium Volume 3 Nomor 1, Universitas Indonesia, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Burgerlijk Wetboek/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Mahkamah Agung, Yurisprudensi Nomor 922/K/Pdt/1995
- Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
- Putusan Nomor 56/PDT.SUS-PKPU/2019/PN.JKT.PST.
- Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum
- Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

SUMBER INTERNET

Haris Satiadi, 2022, "*Kewenangan Hakim Pengawas dalam PKPU dan Kepailitan*", Hukum Online, Edisi 11 Maret 2022.

Mochamad Januar Rizki, 2022, "*Tiga Jenis Kreditur dalam Perkara Kepailitan*", Hukum Online, Edisi 2 Agustus 2022.

Syifaa Faradilla, 2024, "*Konsolidasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", Hukum Online, Edisi Juni 2024.